

## Peran Whistleblowing System dalam Meningkatkan Integritas Birokrasi : Studi pada Instansi Pemerintah

### The Role of the Whistleblowing System in Improving Bureaucratic Integrity: A Study of Government Agencies

Raihan A. Hanasi<sup>1</sup>, Magfira Olii<sup>2</sup>, Vivi Septiani Amu<sup>3</sup>,  
Cidrawati Djafar<sup>4</sup>, Rahmatia Nasution Suaib<sup>5</sup>, Alfina Dery Damayanti<sup>6</sup>  
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo<sup>123456</sup>

Korespondensi penulis: [raihan@ung.ac.id](mailto:raihan@ung.ac.id)

**Abstract.** Bureaucratic integrity is a crucial aspect in realizing transparent, professional, and accountable governance. Various forms of irregularities, such as corruption, abuse of authority, and ethical violations, demonstrate that internal oversight in government agencies still needs strengthening. This study aims to analyze the role of the Whistleblowing System (WBS) in improving bureaucratic integrity in government agencies. The study employed a literature review method with a qualitative descriptive approach, analyzing various scientific journals and academic publications from the past five years. The results indicate that the whistleblowing system plays a crucial role in increasing transparency, accountability, and the effectiveness of internal oversight in public organizations. In addition to serving as a means for reporting violations, this system also supports fraud prevention and strengthens a culture of integrity within the government bureaucracy. However, the implementation of the WBS still faces various obstacles, such as low protection for whistleblowers, a hierarchical organizational culture, and suboptimal follow-up on reports. Therefore, strengthening regulations, legal protection, the use of information technology, and the commitment of organizational leaders are necessary to support the effectiveness of the whistleblowing system in realizing good governance.

**Keywords:** whistleblowing system, bureaucratic integrity, internal oversight, bureaucratic reform, good governance

**Abstrak.** Integritas birokrasi menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel. Berbagai bentuk penyimpangan seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran etika menunjukkan bahwa pengawasan internal pada instansi pemerintah masih perlu diperkuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Whistleblowing System (WBS) dalam meningkatkan integritas birokrasi pada instansi pemerintah. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis berbagai jurnal ilmiah dan publikasi akademik lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa whistleblowing system berperan penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan internal organisasi publik. Selain menjadi sarana pelaporan pelanggaran, sistem ini juga mendukung pencegahan fraud serta memperkuat budaya integritas dalam birokrasi pemerintahan. Namun demikian, implementasi WBS masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya perlindungan terhadap whistleblower, budaya organisasi yang hierarkis, dan kurang optimalnya tindak lanjut laporan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, perlindungan hukum, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen pimpinan organisasi untuk mendukung efektivitas whistleblowing system dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

**Kata Kunci:** whistleblowing system, integritas birokrasi, pengawasan internal, reformasi birokrasi, good governance

## LATAR BELAKANG

Integritas birokrasi merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik. Dalam sistem administrasi publik modern, aparat pemerintah dituntut untuk menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Namun demikian, praktik penyalahgunaan wewenang, korupsi, manipulasi administrasi, dan pelanggaran etika masih menjadi tantangan utama dalam birokrasi pemerintahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan integritas birokrasi memerlukan sistem pengawasan internal yang efektif dan berkelanjutan.

Salah satu instrumen pengawasan internal yang berkembang dalam reformasi birokrasi adalah Whistleblowing System (WBS). Miceli, Near, dan Dworkin (2020) menjelaskan bahwa whistleblowing system merupakan mekanisme pelaporan yang memungkinkan anggota organisasi menyampaikan informasi mengenai tindakan ilegal, tidak etis, maupun penyalahgunaan wewenang kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan korektif. Dalam konteks birokrasi pemerintahan, sistem ini dipandang sebagai instrumen penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Penerapan whistleblowing system pada instansi pemerintah dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengawasan internal karena organisasi dapat memperoleh informasi secara lebih cepat terkait berbagai bentuk penyimpangan. Handayani dan Nugroho (2021) menyatakan bahwa implementasi whistleblowing system memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud pada instansi pemerintah. Selain itu, Sambul, Tinangon, dan Mawikere (2021) menjelaskan bahwa sistem pelaporan pelanggaran mampu memperkuat pengawasan internal dan menekan potensi penyimpangan administrasi pada organisasi publik.

Perkembangan teknologi informasi juga mendorong transformasi mekanisme pelaporan menuju sistem digital yang lebih efisien. (P. S. Akuntansi et al., 2024) menjelaskan bahwa digitalisasi whistleblowing system memberikan kemudahan dalam proses pelaporan, meningkatkan keamanan data pelapor, serta mempercepat penanganan laporan pada instansi pemerintah. Digitalisasi tersebut mendukung reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dan meningkatkan efektivitas pengawasan internal organisasi.

Meskipun demikian, implementasi whistleblowing system masih menghadapi berbagai hambatan. Lee, Kang, dan Kim (2021) menjelaskan bahwa faktor psikologis, budaya organisasi, dan rasa takut terhadap pembalasan menjadi penyebab rendahnya keberanian pegawai dalam melaporkan pelanggaran. Selain itu, Antari (2020) menyebutkan bahwa perlindungan terhadap whistleblower masih menjadi tantangan dalam implementasi sistem pelaporan pada sektor publik di Indonesia.

Transparency International (2021) menegaskan bahwa whistleblowing system merupakan bagian penting dalam membangun budaya integritas dan transparansi pada sektor pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran whistleblowing system dalam meningkatkan integritas birokrasi serta mengidentifikasi hambatan dan strategi penguatan implementasinya pada instansi pemerintah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui pengumpulan berbagai jurnal ilmiah, buku, dan publikasi akademik yang berkaitan dengan whistleblowing system dan integritas birokrasi. Sumber pustaka yang digunakan diprioritaskan pada publikasi lima tahun terakhir, yaitu periode 2020–2025.

Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, reduksi, dan interpretasi data terhadap berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan implementasi whistleblowing system pada instansi pemerintah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran Whistleblowing System dalam Meningkatkan Integritas Birokrasi**

Whistleblowing system merupakan salah satu instrumen pengawasan internal yang berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas birokrasi. Melalui sistem pelaporan pelanggaran yang terintegrasi, instansi pemerintah dapat mendeteksi penyimpangan secara lebih cepat dan efektif.

Menurut (Hanasi, n.d.) pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi publik mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola pemerintahan melalui sistem digital yang mendukung pengawasan terhadap penyelenggaraan birokrasi. Dalam konteks tersebut, whistleblowing system menjadi salah satu instrumen pengawasan berbasis digital yang berperan penting dalam memperkuat integritas birokrasi pada instansi pemerintah.

Whistleblowing system memiliki peran strategis dalam memperkuat integritas birokrasi pada instansi pemerintah. Sistem pelaporan internal memungkinkan organisasi mendeteksi berbagai bentuk penyimpangan secara lebih cepat sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang lebih besar.

Selain itu, whistleblowing system juga berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi publik. (Breliastriti et al., 2025) menjelaskan bahwa whistleblowing system berfungsi sebagai mekanisme transparansi organisasi yang mampu meningkatkan akuntabilitas lembaga melalui pelaporan pelanggaran secara lebih terbuka dan sistematis. Implementasi sistem tersebut dinilai dapat memperkuat pengawasan internal organisasi serta mendorong terciptanya tata kelola organisasi yang lebih baik.

Whistleblowing system juga mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi. (Breliastriti et al., 2025) menjelaskan bahwa sistem pelaporan pelanggaran berfungsi sebagai alarm transparansi organisasi dan mendukung akuntabilitas lembaga publik.

Selain itu, (Masnar & Safitri, 2023) menyatakan bahwa whistleblowing system berkontribusi terhadap penguatan integritas laporan keuangan organisasi. Transformasi digital dalam sistem pelaporan turut memperkuat efektivitas pengawasan internal birokrasi. (Jurnal et al., 2023) menjelaskan bahwa optimalisasi penerapan whistleblowing system berbasis digital mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan mempercepat penanganan laporan pada instansi pemerintah.

## **2. Hambatan Implementasi Whistleblowing System**

Meskipun memiliki berbagai manfaat, implementasi whistleblowing system masih menghadapi sejumlah hambatan. (Kang, 2022) menjelaskan bahwa faktor psikologis seperti rasa takut terhadap ancaman dan pembalasan menjadi penyebab rendahnya keberanian pegawai dalam melaporkan pelanggaran.

Selain itu, budaya birokrasi yang hierarkis juga menjadi penghambat implementasi whistleblowing system. (Putu et al., 2020) menyatakan bahwa lemahnya perlindungan terhadap whistleblower menyebabkan pegawai enggan melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelapor masih perlu diperkuat

(Kang, 2022) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi whistleblowing system tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya organisasi, komitmen pimpinan, dan efektivitas tindak lanjut laporan. Ketika laporan tidak diproses secara profesional dan transparan, maka tingkat kepercayaan pegawai terhadap sistem akan menurun.

## **3. Strategi Penguatan Whistleblowing System**

Penguatan whistleblowing system perlu dilakukan melalui berbagai langkah strategis. (Difa et al., 2026) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi WBS dipengaruhi oleh komitmen organisasi dalam menciptakan sistem pelaporan yang aman, transparan, dan akuntabel.

(J. Akuntansi et al., 2021) menyatakan bahwa organisasi perlu memperkuat budaya etika dan integritas kerja agar pegawai memiliki keberanian untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi. Selain itu, sosialisasi mengenai mekanisme pelaporan juga perlu ditingkatkan agar seluruh aparatur memahami prosedur penggunaan whistleblowing system secara benar.

(Jurnal et al., 2023) menegaskan bahwa optimalisasi teknologi informasi dalam whistleblowing system dapat meningkatkan efektivitas pengawasan internal birokrasi. Digitalisasi sistem pelaporan memungkinkan proses pengaduan dilakukan secara cepat, aman, dan fleksibel sehingga dapat meningkatkan partisipasi pegawai dalam pelaporan pelanggaran.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa whistleblowing system memiliki peran penting dalam meningkatkan integritas birokrasi pada instansi pemerintah. Penerapan sistem pelaporan pelanggaran mampu memperkuat pengawasan internal, meningkatkan transparansi, serta mendorong akuntabilitas organisasi publik. Selain itu, whistleblowing system juga berkontribusi dalam mencegah terjadinya fraud, penyalahgunaan wewenang, dan berbagai bentuk pelanggaran dalam lingkungan birokrasi pemerintahan. Optimalisasi sistem pelaporan berbasis digital juga dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan mempercepat proses penanganan laporan pelanggaran.

Namun, implementasi whistleblowing system masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya keberanian pegawai dalam melaporkan pelanggaran akibat rasa takut terhadap ancaman dan tindakan pembalasan, lemahnya perlindungan terhadap whistleblower, serta budaya birokrasi yang masih bersifat hierarkis. Selain itu,

keberhasilan penerapan whistleblowing system juga dipengaruhi oleh komitmen pimpinan organisasi, budaya etika kerja, dan efektivitas tindak lanjut terhadap laporan yang masuk. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu dipahami dengan hati-hati karena kajian dilakukan berdasarkan studi literatur sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi empiris seluruh instansi pemerintah di Indonesia.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan perlindungan hukum dan keamanan bagi whistleblower agar pegawai merasa aman dalam melaporkan pelanggaran. Instansi pemerintah juga perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait mekanisme whistleblowing system sehingga aparatur memahami prosedur pelaporan secara baik dan benar. Selain itu, pimpinan organisasi perlu menunjukkan komitmen yang kuat dalam menindaklanjuti setiap laporan secara profesional, transparan, dan objektif guna meningkatkan kepercayaan pegawai terhadap sistem pelaporan pelanggaran.

Optimalisasi penggunaan teknologi informasi berbasis digital juga perlu terus dikembangkan agar proses pelaporan dapat dilakukan secara cepat, aman, mudah diakses, dan efektif. Penguatan budaya integritas dan etika kerja dalam birokrasi menjadi langkah penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan studi kepustakaan tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data primer melalui wawancara, observasi, maupun studi kasus pada instansi pemerintah agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kondisi empiris di lapangan.

## REFERENSI

- Akuntansi, J., Indonesia, B., Marciano, B., Syam, A., Ahmar, N., & Pancasila, U. (2021). *WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN PENCEGAHAN FRAUD* : 4(3), 313–324.
- Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., & Brawijaya, U. (2024). *Reaksi 01.01.2024*. 3(1), 205–218.
- Breliastiti, R., Setiawan, T., Herninta, T., & Natalysya, N. L. (2025). *Multidisciplinary Sciences and Arts Whistleblowing System : Alarm Transparency And Bumn Accountability International Journal of*. 4(2), 8–21.
- Difa, A., Aslim, A., Amalya, A. A., & Ayuni, N. (2026). *Whistleblowing System Sebagai Instrumen Etika dan Akuntabilitas Publik di Sektor Pemerintahan : Sebuah Systematic Literature Review*. 2, 1–15.
- Hanasi, R. A. (n.d.). *Peran Teknologi Informasi dalam Modernisasi Administrasi Publik*. 2(1), 64–70.
- Jurnal, J., Mea, I., Di, W. B. S., & Kabinet, S. (2023). *OPTIMALISASI PENERAPAN WHISTLEBLOWER-SYSTEM JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA ( Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi )*. 7(2), 754–781.
- Kang, M. M. (2022). *Whistleblowing in the Public Sector : A Systematic Literature Review*. <https://doi.org/10.1177/0734371X221078784>
- Masnar, R. O., & Safitri, D. (2023). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Integritas Laporan Keuangan : Whistleblowing System Sebagai Variabel Pemoderasi*. 16(2), 343–352.
- Putu, N., Widhi, B., & Nasional, U. P. (2020). *Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Penguatan Whistleblowing System di Indonesia ( Studi Kasus Whistleblowing System di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ( BPK RI ))*. 5(2), 158–167.